



DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PERIKANAN

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”

Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali, Gedung Unit 11 Lt. II

Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409

Email : diskan@badungkab.go.id

TAHUN 2021

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG “MANGUPRAJA MANDALA”
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali, Gedung Unit 11 Lt. II
Telp . 0361 – 9009414, 9009411, Fax 0361 – 9009409
Email : diskan@badungkab.go.id
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat di selesaikan tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun untuk memberikan gambaran pencapaian sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja sasaran strategis tahun anggaran 2020 dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja dan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di masa datang.

Mangupura, 4 Februari 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung,



I Nyoman Suardana, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721010 199302 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Badung.....	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II Perencanaan Kinerja	8
A. Rencana Strategis	8
B. Tujuan dan Sasaran.....	9
C. Perjanjian Kinerja.....	9
BAB III Akuntabilitas Kinerja	12
A. Analisis Pencapaian Kinerja	12
B. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV Penutup	28
Lampiran – Lampiran	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020	10
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan	14
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan	15
Tabel 3.3. Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020.....	15
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan	21
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan.....	23
Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran Program Sektor Perikanan berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2020.....	26

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1.	Alur Pikiran Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020	13
Gambar 3.2.	Grafik Produksi Perikanan Per Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2019 dan 2020	17
Gambar 3.3.	Grafik Trend Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Tahun 2015-2020.....	19
Gambar 3.4.	Grafik target dan realisasi Produksi Olahan Hasil Perikanan sesuai Renstra Tahun 2016 – 2021.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Target Capaian Kinerja 5 Tahun
- Lampiran 2. Target Kinerja Sasaran
- Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Sasaran
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta kinerja yang dihasilkan melalui program dan kegiatan tahun 2020, dimana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan merupakan bagian dari periode Renstra 2016-2021. Terdapat 3 sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran sektor perikanan yang dicapai oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2020.

Tata Cara Penyusunan LKjIP Dinas Perikanan mengacu kepada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rata-rata capaian indikator kinerja tiap sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	7.433	8.546,87	114,99
	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32,99	35,15	106,55
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran				110,77
Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	82,50	86,09	104,35
	Capaian realisasi anggaran dinas (%)	97,00	95,07	98,01
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran				101,18
Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.456	6.480	100,37
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran				100,37
Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran keseluruhan				104,11

Tabel diatas dapat menggambarkan bahwa selama Dinas Perikanan telah mampu mencapai target - target yang telah ditetapkan dan dicantumkan dalam Renstra, RKT, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Berdasarkan rata - rata capaian Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dan Sasaran Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan yang telah mencapai lebih dari 100% atau melebihi target, dapat diketahui bahwa adanya kemajuan yang dicapai Kabupaten Badung dalam sektor perikanan, utamanya jumlah produksi perikanan, tingkat konsumsi ikan dan jumlah produksi olahan hasil perikanan.

Untuk Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan, pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas telah mampu melebihi target yang ditetapkan, begitu juga untuk indikator Capaian realisasi anggaran dinas, telah mampu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2020.

Diyakini bahwa keberhasilan mewujudkan tujuan dan sasaran strategis organisasi tidak semata-mata berdasarkan pada keberhasilan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung, namun juga sangat didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam keberhasilan kinerja sektor perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Badung memiliki potensi ekonomi utama pada sektor pariwisata yang berpusat di badung selatan. Namun diluar daripada itu terdapat beberapa potensi yang menjanjikan jika dikelola dengan baik terlebih jika kondisi iklim pariwisata kurang menguntungkan. Adapun potensi tersebut berasal dari sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Pada sektor perikanan terdapat 3 (jenis) usaha yang dapat dikembangkan yakni perikanan budidaya, perikanan tangkap serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan.

Komitmen pemerintah dalam pengelolaan maritim sangat tinggi, karena disadari *blue economy* merupakan salah satu alternatif kedepan. Komitmen pemerintah di era reformasi yang ditandai antara lain dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, dan berhasil guna serta berorientasi pada hasil (*result oriented government*) maka pemerintah terus melakukan penyempurnaan tatakelola pemerintahan agar pembangunan memiliki kemanfaatan yang optimal.

Dinamika pembangunan yang sangat dinamis mendorong pemerintah daerah terus meningkatkan kinerjanya. Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka melakukan terobosan pembangunan bertumpu pada 6 (enam) pilar pembangunan yaitu ***pro growth*** (pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat); ***pro jobs*** (penciptaan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang baik); ***pro poor*** (pengentasan kemiskinan); ***pro culture*** (pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat); ***pro environment*** (pelestarian lingkungan); dan ***pro law enforcement*** (penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan).

Merujuk Inpres Nomor 7 Tahun 1999, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin Pejabat Eselon II ke atas

diwajibkan menyusun Perencanaan Strategik untuk masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dipandang masih belum optimal dalam mencapai *good governance*. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi ini mengamatkan agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam Dokumen SAKIP memuat beberapa dokumen diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (RA), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Sedangkan dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang berisikan realisasi pencapaian

indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan kinerja atas kegiatan tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian kinerja sasaran Sektor Perikanan

2. Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP ini sebagai pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Kepala Dinas Perikanan atas kinerja sektor perikanan kepada Bupati Badung selaku pihak yang memberikan amanah dan tugas.

3. Manfaat

Manfaat penyusunan LKjIP ini yaitu:

- 1) Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- 2) Bahan masukan bagi penyempurnaan dokumen rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja pada periode yang akan datang;
- 3) Bahan penyempurnaan pengelolaan program dan kegiatan pada periode berikutnya;
- 4) Bahan masukan dan pertimbangan pengambilan kebijakan sektor perikanan;
- 5) Meningkatkan kualitas perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan dan perencanaan penggunaan sumberdaya serta sumber dana;
- 6) Meningkatkan kredibilitas instansi terhadap instansi vertikal lainnya yang lebih tinggi dan meningkatkan pula kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah;

- 7) Memberikan informasi akurat dan obyektif tentang sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab instansi;
- 8) Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga proses pembangunan sektor perikanan bisa berlangsung lebih baik, lebih transparan, lebih efisien dan efektif serta lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (lebih akuntabel).

C. GAMBARAN UMUM DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

Dalam rangka mengimplementasikan dan menyelaraskan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka OPD yang ada di Pemerintahan Kabupaten Badung disusun kembali berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Pembentukan organisasi perangkat daerah baru telah diterbitkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Perikanan Kabupaten Badung terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri atas :
 - a) Seksi Penyusunan Program
 - b) Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Seksi Pengkajian dan Pengembangan;

3. Bidang Produksi dan Sarana terdiri atas :
 - a) Seksi Perikanan Tangkap
 - b) Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir; dan
 - c) Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya
5. Unit Pelaksana Teknis;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Badung Nomor 84 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Badung dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi

- a) perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya; dan;
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

ISU-ISU STRATEGIS

Berikut isu-isu strategis yang dihadapi sektor perikanan antara lain;

- a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bidang perikanan.
- b. Belum sempurnanya basis data dan informasi potensi sektor perikanan.
- c. Belum terwujudnya tata ruang wilayah sektor perikanan secara optimal.
- d. Permodalan bidang usaha perikanan yang masih minim.
- e. Masih kalahnya daya saing produk hasil perikanan di pasaran.
- f. Kondisi alam dan iklim tahunan yang tidak menentu mempengaruhi kondisi fluktuasi jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung.
- g. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan.
- h. Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tingkat produktivitas usaha perikanan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Badung merupakan laporan yang berisi penjelasan mengenai capaian kinerja selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreemant*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Badung. Analisis atas capaian kinerja memungkinkan dilakukan identifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Dengan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum tentang struktur organisasi perangkat kerja dan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Bab satu juga menjelaskan isu-isu yang berkembang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pokok Dinas Perikanan serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas / ikhtisar Rencana strategis di Tahun 2020 dan menyampaikan bagian dari perjanjian kinerja yang akan di evaluasi dan dianalisa oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan kinerja sasaran sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2020. Untuk setiap kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan evaluasi dan analisa capaian kinerja sesuai dengan Lampiran II pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

B. Realisasi Anggaran

Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2020 untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung tahun 2020 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2020 program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada pagu induk Dinas Perikanan Kabupaten Badung mengalami rasionalisasi dan *refocusing* anggaran yang disebabkan adanya wabah virus corona (Covid-19) sehingga pada pagu perubahan mengalami penurunan anggaran yang cukup drastis. Namun kontribusi terhadap tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2016-2021 masih mampu untuk dicapai. Tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target selama 5 tahun dapat dilihat pada lampiran 1. Target indikator kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 tercantum dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Dinas Perikanan Tahun 2020. Tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya dapat dilihat pada lampiran 2. Berikut tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Badung :

Terdapat 1 tujuan sebagai acuan yaitu

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan

Sasaran yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan produksi perikanan

2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan perikanan
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin diwujudkan adalah :

Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan.

Indikator Kinerja Tujuan:

- Jumlah produksi perikanan
- Jumlah tingkat konsumsi ikan

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran strategis yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan produksi perikanan.

Indikator kinerja sasaran:

- Jumlah produksi perikanan (ton)
- Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)

2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan.

Indikator kinerja sasaran:

- Nilai akuntabilitas kinerja dinas
- Capaian realisasi anggaran dinas (%)

3. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan.

Indikator kinerja sasaran:

- Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja tahun 2020 Dinas Perikanan menetapkan

perjanjian kinerja seperti pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan produksi perikanan	1. Jumlah produksi perikanan (Ton)	7.433 ton
		2. Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	32,99 (kg/kapita/tahun)
2	Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	1. Nilai akuntabilitas kinerja dinas	82,50
		2. Capaian realisasi anggaran dinas (%)	97,00
3	Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	1. Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.456 ton

Program kerja oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung pada tahun 2020 dalam rangka memberikan kontribusi terhadap tercapainya kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 786.710.892,00
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 174.661.065,00
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 114.519.060,00
- d. Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 14.743.100,00
- e. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp 289.339.610,02
- f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp 6.152.200,00

- g. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp 6.938.400,00
- h. Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp 321.757.100,00
- i. Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata, dengan pagu APBD Perubahan sebesar Rp. 339.232.610,00

Untuk lebih lengkapnya, program dan kegiatan APBD 2020 dapat dilihat pada lampiran 3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dinas Perikanan Kabupaten Badung selaku pengemban amanah dari Bupati Badung melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat capaian target indikator kinerja utama pada sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen perubahan perjanjian kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi kinerja yang masing-masing dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja sasaran (lampiran 3). Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk penjelasan lebih lanjut, juga dilakukan pengukuran capaian kinerja kegiatan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *input*, *output* dan *outcome* yang masing-masing dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) pada lampiran 4. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan. Alur pikir penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja tahun 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian (%)
Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	9.563,74	7.433	8.546,87	114,99
	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	34,12	32,99	35,15	106,55
Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan, pelayanan perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	85,79	82,50	86,09	104,35
	Capaian realisasi anggaran dinas (%)	96,55	97	95,07	98,01
Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.519	6.456	6.480	100,37

A. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

Analisis pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran dinas. Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran).

Dalam analisis ini juga akan diuraikan hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan serta langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Sasaran I

Meningkatkan produksi perikanan

Produksi perikanan merupakan salah satu elemen dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat yang bersumber dari ikan. Kecukupan gizi masyarakat melalui pemenuhan protein ikan merupakan salah satu usaha Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam rangka mendukung program dasar ketahanan pangan Bupati Badung guna menyejahterakan masyarakat.

Sasaran Dinas Perikanan dalam peningkatan produksi perikanan diukur dengan 2 indikator kinerja. Berikut perkembangan capaian indikator kinerja sasaran seperti pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Target 2019	Kinerja Tahun 2019	Capaian tahun 2019(%)	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian tahun 2020 (%)
Jumlah produksi Perikanan (ton)	7.293	9.563,74	131,14	7.433	8.546,87	114,99
Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32,97	34,12	103,49	32,99	35,15	106,55

Dari tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, target indikator kinerja jumlah produksi perikanan sebesar 7.433 ton, sedangkan realisasi produksi perikanan sebesar 8.546,87 ton. Sehingga capaian kinerja jumlah produksi perikanan mencapai 114,99% dan mampu melampaui dari target sebesar 14,99%. Pada capaian kinerja tingkat konsumsi ikan mencapai 106,55% dengan realisasi sebesar 35,15 kg/kapita/tahun, dari target yang ditentukan sebesar 32,99 kg/kapita/tahun.

Jumlah Produksi Perikanan

Hasil produksi perikanan dijelaskan melalui tabel 3.3 yang memuat hasil produksi perikanan secara lengkap per kecamatan yang ada di Kabupaten Badung.

Tabel 3.3. Produksi Perikanan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	KECAMATAN	Kegiatan							JUMLAH
		Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
		Penangkapan Laut	Perairan Umum	Rumput Laut	Tambak	Kolam air tenang	saluran irigasi	sawah (inmindi dan non inmindi)	
1	KUTA SELATAN	1.639,34	-	-	-	-	-	-	1.639,34
2	KUTA	5.896,23	-	-	-	-	-	-	5.896,23
3	KUTA UTARA	123,57	-	-	-	90,80	-	-	214,37

NO	KECAMATAN	Kegiatan							JUMLAH
		Perikanan Tangkap (ton)		Perikanan Budidaya (ton)					
		Penangkapan Laut	Perairan Umum	Rumput Laut	Tambak	Kolam air tenang	saluran irigasi	sawah (inmindi dan non inmindi)	
4	MENGWI	252,63	4,66	-	-	152,91	0,54	-	410,74
5	ABIANSEMAL	-	3,02	-	-	241,45	-	3,15	247,62
6	PETANG	-	2,89	-	-	133,34	-	2,34	138,57
JUMLAH 2020		7.911,77	10,57	-	-	618,50	0,54	5,49	8.546,87
TOTAL 2020		7.922,34		624,53					8.546,87
TARGET 2020		6.816,00		617,00					7.433,00
JUMLAH 2019		8.789,22	44,36	-	-	725,42	-	4,74	9.563,74
TOTAL 2019		8.833,58		730,16					9.563,74

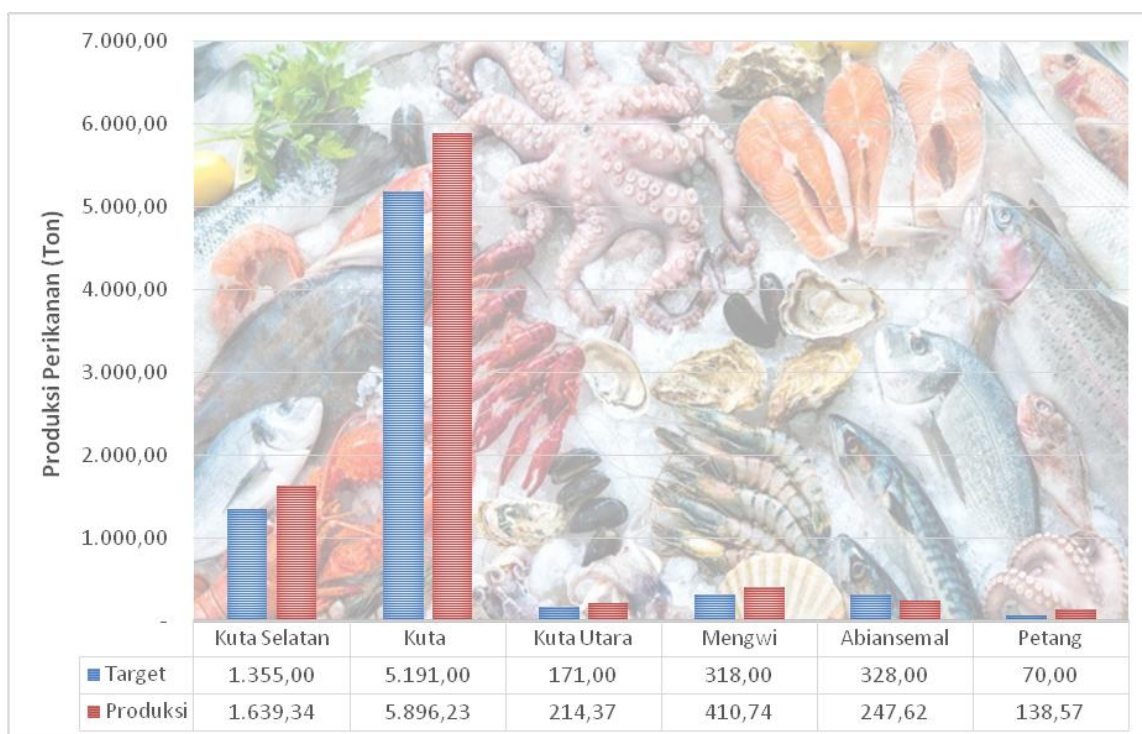
Jumlah produksi perikanan Kabupaten Badung tahun 2020 sebesar 8.546,87 ton, telah melampaui dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 7.433 ton, atau mencapai 114,99%.

Jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung berasal dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 7.922,34 ton telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 6.816 ton atau mencapai besaran 116,23%. Perikanan tangkap terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum yang didukung oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Badung. Produksi penangkapan laut berasal dari kecamatan Kuta Utara, Kuta, Kuta Selatan dan Mengwi, sedangkan produksi perairan umum berasal dari kecamatan Mengwi, Abiansemal dan Petang

Sedangkan jumlah produksi perikanan dari sektor perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 624,53 dimana telah melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 617 ton atau mencapai 101,22%. Perikanan budidaya di Kabupaten Badung terdiri dari budidaya di kolam air tenang, saluran irigasi dan minapadi yang didukung oleh 4 kecamatan yaitu Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal dan Petang.

Tingkat produksi perikanan perkecamatan tahun 2020 dibandingkan dengan target dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2. Grafik Produksi Perikanan Per Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2020



Dari grafik yang terdapat pada Gambar 3.2, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah Kecamatan Kuta dengan produksi sebesar 5.896,23 ton dari total 8.546,87 ton atau memberikan kontribusi sebesar 68,99%. Sedangkan produksi perikanan terbesar kedua berada pada kecamatan Kuta Selatan dengan jumlah produksi sebesar 1.639,34 ton atau memberi kontribusi sebesar 19,18% terhadap produksi perikanan di Kabupaten Badung. Kecamatan yang memberikan kontribusi terkecil terhadap jumlah produksi perikanan di Kabupaten Badung adalah kecamatan Patang sebesar 1,62% namun tingkat realisasi mencapai 197,96% atau sebesar 138,57 ton dari target produksi 70 ton. Besarnya tingkat realisasi produksi perikanan pada Kecamatan Patang terjadi karena banyaknya minat masyarakat yang beralih profesi/sambilan untuk membudidayakan ikan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak karyawan yang dirumahkan dari sektor pariwisata.

Pada Kecamatan Kuta Utara target produksi perikanan sebesar 171 ton yang terdiri dari target perikanan tangkap sebesar 123 ton dan target perikanan budidaya sebesar 48 ton. Sedangkan realisasi produksi perikanan pada Kecamatan Kuta Utara sebesar 214,37 ton atau

mencapai 125,36% dimana didukung dari produksi perikanan tangkap sebesar 123,57 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 90,80 ton.

Produksi perikanan pada Kecamatan Mengwi berasal dari produksi perikanan tangkap sebesar 257,29 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 153,45 ton sehingga total produksi sebesar 410,74 ton. Sedangkan target produksi perikanan untuk Kecamatan Mengwi sebesar 318 ton terdiri dari target perikanan tangkap sebesar 143 ton dan target perikanan budidaya sebesar 175 ton. Maka capaian kinerja produksi perikanan pada Kecamatan Mengwi mencapai 129,16%.

Namun pada Kecamatan Abiansemal jika dilihat dari grafik diatas produksi perikanan tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 328 ton. Realisasi produksi perikanan sebesar 247,62 ton atau mencapai 75,49%. Hal ini terjadi karena dari sektor perikanan budidaya terjadi upaya penekanan jumlah produksi. Hal tersebut disebabkan oleh melimpahnya produksi perikanan namun terjadi kesulitan pemasaran disertai daya beli masyarakat yang menurun, karena sektor pariwisata mengalami mati suri akibat pandemi Covid-19. Sedangkan pada produksi perikanan tangkap di Kecamatan Abiansemal yang didukung dari hasil tangkapan di perairan umum daratan mampu melampaui target sebesar 2 ton dengan realisasi 3,02 ton atau mencapai 151%.

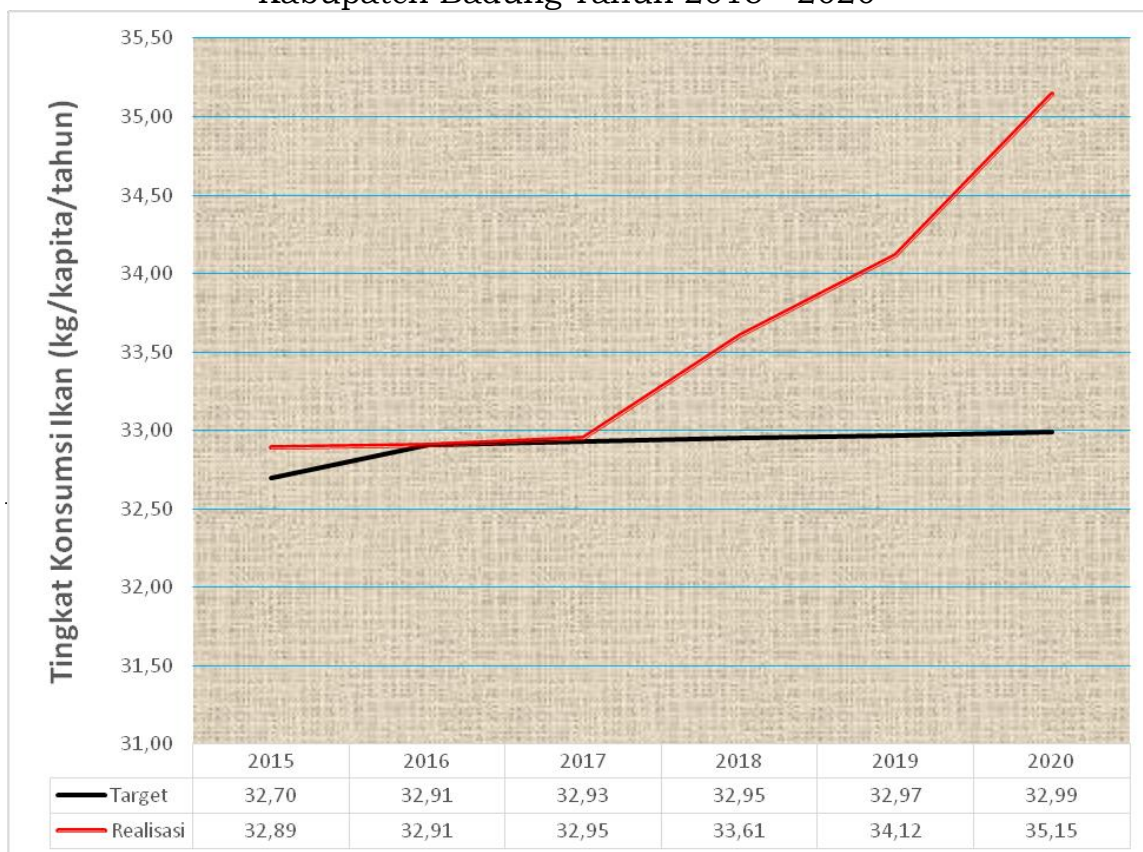
Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung.

Tingkat konsumsi ikan adalah jumlah ikan yang dikonsumsi oleh tiap orang per tahun. Tingkat konsumsi ikan dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan oleh masyarakat. Menurut Widia Karya Nasional, Pangan dan Gizi IV 1998, kebutuhan manusia akan protein pangan adalah 58 gram/kapita/hari yang terdiri dari protein nabati 40 gram/kapita/hari, protein ikan 12 gram/kapita/hari setara dengan $\pm 66,7$ gram ikan/kapita/hari, protein hewani 6 gram/kapita/hari yang setara dengan daging 10,3 kg/kapita/tahun, telur 6,5 kg/kapita/tahun dan susu 7,2 kg/kapita/tahun. Dengan jumlah penduduk sebesar 490.564 jiwa (sumber: Badung dalam Angka 2019) maka Kabupaten Badung minimal harus memiliki ketersediaan daging sebanyak 5.052.809 kg/tahun (5.052,81 ton) dan ikan sebanyak 11.943,03 ton/tahun (66,70 gram/kapita/hari).

Berdasarkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 bahwa tingkat konsumsi ikan sebesar 35,15 kg/kapita/tahun itu sama dengan 96,30 gr/kapita/hari, maka kinerja dinas masih memenuhi standar gizi menurut Widia Karya, Pangan dan Gizi serta memiliki pengaruh positif atau memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung dari sektor perikanan karena tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Badung masih melebihi standar minimal ketersediaan protein nabati berdasarkan Widia Karya, Pangan dan Gizi.

Tingkat produksi perikanan berperan penting terhadap tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung. Trend konsumsi ikan selama tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya seperti gambar grafik 3.3 berikut.

Gambar 3.3 Grafik Trend Peningkatan Tingkat Konsumsi Ikan Kabupaten Badung Tahun 2015 - 2020



Pencapaian kinerja tingkat konsumsi ikan Kabupaten Badung pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,15 kg/kapita/th atau mencapai 106,55% jika dibandingkan dari target tahun 2020 sebesar 32,99 kg/kapita/tahun. Dari gambar 3.1, trend grafik tingkat konsumsi ikan

terjadi peningkatan yaitu dari 32,89 kg/kapita/tahun menjadi 35,15 kg/kapita/tahun atau meningkat sebesar 2,26 kg/kapita/tahun selama 5 tahun. Dengan peningkatan rata – rata setiap tahunnya 1,15%. Jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi ikan Provinsi Bali yang mencapai 38,83 kg/kapita/tahun, Kabupaten Badung telah mampu mendekati dengan capaian 90,52% dari hasil tersebut. Peningkatan ini menjadi sebuah indikasi kesadaran masyarakat Kabupaten Badung akan pentingnya mengkonsumsi makanan bernilai gizi tinggi seperti ikan. Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal serta untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pangan merupakan kebutuhan pokok hidup manusia termasuk didalamnya daging, telur dan ikan sebagai sumber protein hewani yang sangat berpengaruh terhadap gizi manusia. oleh karenanya ketersediaannya perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Guna meningkatkan tingkat konsumsi ikan, Dinas Perikanan Kabupaten Badung akan terus fokus terhadap program-program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sehingga produksi perikanan tangkap maupun budidaya dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga dapat menumbuhkembangkan sentra-sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Ketersediaan pasokan ikan secara kontinyu dapat mendukung peningkatan konsumsi ikan. Disamping itu perlu digalakan promosi produk dan gerakan makan ikan di Kabupaten Badung.

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan secara umum menunjukkan hasil yang positif dari target yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk mendukung sasaran tersebut adalah melalui 4 program yaitu Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan dan Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata yang kemudian diturunkan pada 7 kegiatan pada tahun 2020.

Sasaran II
Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan

Sasaran strategis Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan merupakan sasaran yang baru mulai dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada Tahun 2017, dan tetap dilanjutkan pada tahun 2020. Sasaran ini mulai diterapkan mengingat pentingnya Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan pada urusan Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Perencanaan yang baik sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah, karena tanpa adanya perencanaan yang baik maka akan sulit untuk mengukur tingkat keberhasilan dari suatu program dan kegiatan, selain itu perencanaan dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan dan pengembangan dari nelayan dan pembudidaya ikan yang berada di bawah koordinasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Untuk dapat mengukur kinerja suatu Perangkat Daerah juga dibutuhkan adanya evaluasi – evaluasi kinerja Perangkat Daerah, yang termasuk di dalamnya evaluasi Realisasi Anggaran, sehingga akan dapat diketahui secara transparan dan jujur tentang penggunaan anggaran baik APBD maupun APBN. Hal ini dimaksudkan nantinya mendorong terjadinya *Good Governance* di lingkungan Kabupaten Badung secara umum dan Dinas Perikanan secara khususnya.

Berikut dijelaskan mengenai capaian indikator Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan, yang akan dimulai dengan tabel. 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019 (%)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)
Meningkatkan Pengelolaan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas	82	85,79	104,62	82,50	86,09	104,35

Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan	Capaian Realisasi Anggaran Dinas (%)	96,00	96,55	100,57	97,00	95,07	98,01
---	--------------------------------------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

1. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas

Capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas mencapai 104,35% dari target 82,50 sudah mencapai 86,09.

Penilaian ini didapat dari hasil penilaian rutin tahunan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Badung, yang meliputi penilaian terhadap kesesuaian seluruh dokumen perencanaan yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2. Indikator Kinerja Capaian Realisasi Anggaran Dinas (%)

Realisasi Anggaran Dinas pada tahun 2020 mencapai 95,07% dari target yang ditetapkan sebesar 97% atau capaian kinerja mencapai 98,01%. Mengalami penurunan tingkat realisasi dari Tahun 2019 sebesar 1,48% dari 96,55% menjadi 95,07% pada Tahun 2020.

Pada Tahun 2020, Dinas Perikanan tidak mampu mencapai target realisasi anggaran dinas, hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 sehingga penggunaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Badung mempertimbangkan skala prioritas.

Pencapaian sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan pada Dinas Perikanan didukung oleh seluruh program dan kegiatan pada Dinas Perikanan, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 9.929.358.466,02 dengan realisasi sebesar Rp. 9.439.573.101,72 atau mencapai 95,07%.

Sasaran III

Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan

Sumber daya perikanan yang ada menjadikan ikan berpeluang tinggi dalam memberikan kontribusi di dalam memasok kebutuhan konsumsi protein masyarakat, khususnya sumber protein hewani. Tingginya keanekaragaman hayati merefleksikan semakin besarnya potensi yang dapat dikembangkan, seperti sebagai sumber plasma nutfah, sumber pangan, bahan baku industri farmasi dan kosmetik, dan pendukung untuk pengembangan kawasan industri dan pariwisata.

Potensi-potensi tersebut di atas tidak akan memberikan dampak yang signifikan apabila tidak dikelola secara profesional dengan tetap memperhatikan aspek pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, kebijakan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk perikanan prima yang berdaya saing. Melalui sasaran yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Badung, diharapkan adanya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan dan Peningkatan produksi pemasaran komoditi perikanan, Berikut Capaian kinerja sasaran peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 seperti tabel 3.5 berikut;

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Capaian Tahun 2019 (%)	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020 (%)
Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.329	6.519	103,00	6.456	6.480	100,37

Dari tabel 3.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Pencapaian kinerja jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 sebesar 100,37% atau sebesar 6.480 ton dari target yang ditetapkan sebesar

6.456 ton. Capaian kinerja ini terjadi karena terdapat 16 kelompok pengolah hasil perikanan dengan anggota mencapai 378 orang yang memberikan kontribusi terhadap produksi pengolahan di Kabupaten Badung. Jenis usaha pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap jumlah produksi meliputi: Pengolahan ikan pindang; pengolahan ikan tuna; pengolahan rumput laut; pengolahan ikan lele; pengasapan ikan; abon ikan.

Capaian indikator kinerja jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2020 mencapai 100,37%, yang jika dibandingkan dengan Indikator Kinerja Sasaran pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,63%. Penurunan capaian kinerja tersebut disebabkan karena kondisi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pemasaran ke sektor pariwisata tersendat disertai daya beli masyarakat yang melemah sehingga kelompok pengolah membatasi jumlah hasil olahannya.

Gambar 3.4 Grafik target dan realisasi Produksi Olahan Hasil Perikanan sesuai Renstra Tahun 2016 – 2021



Pada grafik di atas, terlihat target dan realisasi pada Produksi Olahan Hasil Perikanan sesuai dengan Renstra Tahun 2016 – 2021. Terlihat adanya pencapaian produksi hasil olahan yang telah melebihi

dari target dan mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019, namun mengalami penurunan produksi pada tahun 2020 akan tetapi masih mampu melampaui target. Indikator Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan baru mulai ditetapkan pada Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016 – 2021.

Peningkatan produksi pada umumnya tergantung terhadap ketersediaan bahan baku yang ada yaitu produksi perikanan disamping itu perlunya teknologi penanganan produksi hasil perikanan melalui pengadaan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan, perlunya industrialisasi pengolahan hasil perikanan untuk menangani hasil tangkap dalam jumlah besar pada musim puncak, serta sosialisasi terhadap kelompok-kelompok pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Badung.

Pencapaian kinerja sasaran Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan secara umum menunjukkan hasil yang cukup positif jika dibandingkan dengan target, sasaran ini hanya memiliki 1 program di tahun 2020 yaitu Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan dan 1 kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Mutu Ikan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja sasaran pada sektor perikanan dibiayai oleh APBD Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi APBD Perubahan Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2020. Pemanfaatan pagu anggaran tahun 2020 melalui Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.875.304.429,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.054.054.037,02. Anggaran belanja langsung terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 102.495.000,00, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.918.759.037,02 dan belanja modal sebesar Rp. 32.800.000,00.

Pagu anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sektor perikanan Tahun 2020 secara rinci seperti pada tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Anggaran Program Sektor Perikanan berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran strategis	Program	Dana (Rupiah)				%	
		Pagu 2019	Realisasi 2019	2020			
				Pagu	Realisasi		
Meningkatkan Produksi Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	545.591.152	467.846.260	6.152.200	5.437.170	88,38	
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	130.144.536	129.188.949	289.339.610,02	272.225.520	94,09	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil	-	-	6.938.400	0	0	
	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	22.108.398	22.091.148	-	-	-	
	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	207.055.118	206.831.200	339.232.610	328.164.788,72	96,74	
	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	34.539.914	34.456.965	321.757.100	312.522.700	97,13	
	Meningkatkan Pengelolaan, Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.135.971.290	1.040.818.298	786.710.892	736.367.949	93,60
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	6.486.051.630	6.467.833.736	174.661.065	146.402.750	83,82

Sasaran	Program	Dana (Rupiah)				%
	Aparatur					
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	321.864.397	259.454.125	114.519.060	108.312.502	94,58
	Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD	12.733.519	12.520.740	14.743.100	14.603.900	99,06
	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi Perikanan	241.482.893	238.557.308	-	-	-
Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan	22.108.398	22.091.148	-	-	-
	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	34.539.914	34.456.965	321.757.100	312.522.700	97,13
	Total	9.137.542.847	8.879.598.729	2.054.054.037,02	1.924.037.279,72	93,67

Tabel 3.6 diatas, menggambarkan bahwa seluruh program dan kegiatan sektor perikanan telah memanfaatkan anggaran APBD Tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 1.924.037.279,72 yaitu mencapai 93,67% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.054.054.037,02. Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 7.515.535.822 atau mencapai 95,43% dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.875.304.429. Dari total pagu anggaran Dinas Perikanan tahun 2020 yang sebesar Rp. 9.929.358.466,02 telah direalisasi sebesar Rp. 9.439.573.101,72 atau mencapai sebesar 95,07 %.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini tentunya masih jauh dari sempurna namun ini merupakan langkah baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah PERMENPAN-RB No 53 Tahun 2014.

Dari hasil evaluasi dan analisis kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 dapat disimpulkan rata-rata persentase capaian kinerja sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Badung untuk sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan sebesar 110,77%, sedangkan rata - rata persentase capaian kinerja untuk sasaran Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan sebesar 101,18% dan rata-rata persentase capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pengembangan Usaha dan Pengolahan Perikanan sebesar 100,37%.

Berdasarkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020, yaitu tingkat konsumsi ikan sebesar 35,15 kg/kapita/tahun itu sama dengan 96,30 gr/kapita/hari, maka kinerja dinas masih memenuhi standar gizi menurut Widia Karya, Pangan dan Gizi serta memiliki pengaruh positif atau memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Badung dari sektor perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020 diharapkan dapat

memberikan gambaran secara obyektif dan menyeluruh tentang akuntabilitas kinerja dinas.

Mangupura, 4 Februari 2021

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Badung



I Nyoman Suardana, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721010 199302 1 002

LAMPIRAN

TARGET KINERJA SASARAN

Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas Perikanan Kabupaten Badung
: 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	KET.
1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan dalam rangka mendukung ketersediaan pangan.	1 Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	7.433	
		Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32,99	
	2 Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	82,50	
		Capaian realisasi anggaran dinas (%)	97	
	3 Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.456	

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Perangkat Daerah
Tahun

: Dinas Perikanan Kabupaten Badung
: 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	KET.
1. Meningkatkan produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (ton)	7.433	8.546,87	114,99%	
	Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	32,99	35,15	106,55%	
2. Meningkatkan pengelolaan perencanaan, pengembangan dan pelayanan perikanan	Nilai akuntabilitas kinerja dinas	82,50	86,09	104,35%	
	Capaian realisasi anggaran dinas (%)	97	95,07	98,01%	
3. Meningkatkan pengembangan usaha dan pengolahan perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.456	6.480	100,37%	

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

Lampiran 4.

No	Program	Kegiatan				Realisasi	% Pencapaian	Keterangan
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Input : Jumlah dana Output : Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik Outcome: Bulan terbayarnya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Rupiah Bulan Bulan	45.324.000 12 12	34.611.789 12 12	76,37 100,00 100,00	
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat Outcome: Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan dinas	Rupiah kendaraan kendaraan	14.530.000 26 26	11.992.320 26 26	82,53 100,00 100,00	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input: Jumlah dana Output: Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun Jumlah pengadaan Buku Cek dalam 1 Tahun Outcome: Materai dan buku cek yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	Rupiah buah buku buah buku	2.615.000 500 5 500 5	2.615.000 500 5 500 5	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan alat tulis kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan Outcome: Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	Rupiah Item Item	38.361.895 32 32	38.361.895 32 32	100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pencetakan dan Penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan Outcome: Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	Rupiah paket paket	12.478.245 1 1	12.476.245 1 1	99,98 100,00 100,00	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kantor yang Mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan Outcome: Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	Rupiah bangunan bangunan	9.422.300 5 5	9.422.300 5 5	100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun Outcome: Kantor yang memerlukan peralatan rumah tangga	Rupiah kantor/ bangunan kantor/ bangunan	3.671.800 4 4	3.671.800 4 4	100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Bahan Bacaan surat kabar/Majalah Dinas yang dimanfaatkan Outcome: Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	Rupiah Eksp/bulan Eksp/bulan	53.028.000 576 576	53.028.000 576 576	100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan makanan dan minuman	Input : Jumlah dana Output : Jumlah makanan dan minuman yang disuguhkan untuk Tamu Outcome: Makanan dan minuman yang disuguhkan untuk tamu	Rupiah Kotak Dus Kg Kg Kotak Galon Kotak Dus Kg Kg Kotak Galon	2.060.000 500 24 24 12 12 120 500 24 24 12 12 120	2.060.000 500 24 24 12 12 120 500 24 24 12 12 120	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan Outcome: Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	Rupiah LS LS	19.916.400 1 1	19.916.400 1 1	100,00 100,00 100,00	
		Penyediaan dekorasi	Input : Jumlah dana Output : Jumlah bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari-hari besar Outcome : Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari-hari besar	Rupiah Bangunan Bangunan	12.484.752 4 4	- 0 0	0,00 0,00 0,00	

No	Program	Kegiatan				Realisasi	% Pencapaian	Keterangan		
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar Outcome : Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	Rupiah kendaraan kendaraan	100.642.500 26 26	86.678.200 26 26	86,12 100,00 100,00			
		Penyediaan upacara keagamaan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 12 bulan Outcome : Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	Rupiah Bangunan Bangunan	132.840.000 5 5	130.190.000 5 5	98,01 100,00 100,00			
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan Outcome : Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	Rupiah orang Orang	339.336.000 9 9	331.344.000 9 9	97,64 100,00 100,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik Outcome : Kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik	Rupiah Kantor/ bangunan Kantor/ bangunan	6.000.000 4 4	6.000.000 4 4	100,00 100,00 100,00			
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Sarana mobilitas yang dapat beroperasi dengan lancar Outcome : Sarana mobilitas yang dapat beroperasi dengan lancar	Rupiah kendaraan kendaraan	74.000.000 26 26	56.578.800 26 26	76,46 100,00 100,00			
		Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik Outcome : Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	Rupiah Unit Unit	11.000.000 11 11	5.836.500 11 11	53,06 100,00 100,00			
		Pemeliharaan Peralatan Kantor	Input : Jumlah dana Output : Jumlah peralatan kantor yang berfungsi dengan baik Outcome : Peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	Rupiah paket paket	10.721.265 1 1	5.985.000 1 1	55,82 100,00 100,00			
		Pembangunan BBI Baha	Input : Jumlah dana Output : Jumlah Pembangunan BBI Baha Outcome : Target produksi benih ikan air tawar	Rupiah dok dok	72.939.800 1 1	72.002.450 1 1	98,71 100,00 100,00			
		3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat daerah	Input : Jumlah dana Output : Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja Outcome : Pengelola keuangan yang dibayar	Rupiah orang orang	102.583.700 32 32	96.448.200 32 32	94,02 100,00 100,00	
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Input : Jumlah dana Output : Jumlah dokumen akip yang tersusun : - RKT (Rencana Kerja Tahunan),Perubahan RKT - PK (Penetapan Kinerja),Perubahan PK - IKU (Indikator kinerja Utama),Perubahan IKU - LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) - PK Eselon/Staf dan Rencana Aksi Outcome : Jumlah laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	Rupiah Exp Exp Exp Exp Exp Exp	11.935.360 30 30 30 20 20 130	11.864.302 30 30 30 20 20 130	99,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	
		4	Program Dokumentasi Perencanaan dan Penganggaran PD	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Input : Jumlah dana Output : Jumlah dokumen perencanaan PD Outcome : Dokumen perencanaan PD yang tersedia	Rupiah Buku Buku	14.743.100 60 60	14.603.900 60 60	99,06 100,00 100,00	
		5	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	Input : Jumlah dana Output : Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional Outcome : Hasil produksi benih ikan air tawar	Rupiah petak kolam ekor/tahun	209.587.180,02 26 2.000.000	206.946.020 26 2.102.000	98,74 100,00 105,10	
Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit ikan	Input : Jumlah dana Output : Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium Outcome : Data identifikasi penyakit ikan yang tersedia			Rupiah Sampel LHU	39.564.800 10 10	25.225.600 10 10	63,76 100,00 100,00			

No	Program	Kegiatan				Realisasi	% Pencapaian	Keterangan
		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target			
6	Program pengembangan perikanan tangkap	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kolam Air Deras	Input : Jumlah dana	Rupiah	40.187.630	40.053.900	99,67	
			Output : Jumlah DED Pembangunan Kolam Air deras yang disusun	dok	1	1	100,00	
			Outcome : Jumlah dokumen DED pembangunan kolam air deras yang tersedia	dok	1	1	100,00	
7	Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perikanan	Peningkatan Operasional PPI Diskan Kab. Badung	Input : Jumlah dana	Rupiah	6.152.200	5.437.170	88,38	
			Output : Jumlah PPI yang mendapatkan biaya operasional	Unit	1	1	100,00	
			Outcome : PPI yang dapat beroperasi	Unit	1	1	100,00	
8	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil	Pembinaan Teknis Penanganan Mutu Ikan	Input : Jumlah dana	Rupiah	321.757.100	312.522.700	97,13	
			Output : Jumlah anggota kelompok pengolah dan pemasar ikan yang dibina dan peserta bimtek jaminan mutu ikan	Orang	50	50	100,00	
			Outcome : Jumlah pengolah dan pemasar ikan yang meningkat pengetahuan dan keterampilan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar mutu mendukung pengembang usaha wisata kuliner dari ikan	orang	50	50	100,00	
9	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Penumbuhkembang dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	Input : Jumlah dana	Rupiah	6.938.400	-	-	
			Output : Jumlah Kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	Kelompok				
			Outcome : Kelompok yang meningkat kemampuan kelas kelompoknya	Kelompok				
9	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Input : Jumlah dana	Rupiah	230.016.610	227.985.788,72	99,12	
			Output : Jumlah Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Unit	1	1	100,00	
			Outcome : Tersedianya Tempat Pembinaan dan Pertemuan yang memadai	Klp,Nelayan	1	1	100,00	
9	Program Pengembangan Kawasan Pesisir Lestari Penunjang Pariwisata	Sosialisasi Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Nelayan di Era "New Normal"	Input : Jumlah dana	Rupiah	109.216.000	100.179.000	91,73	
			Output : Jumlah nelayan yang mengikuti sosialisasi	orang	40	40	100,00	
			Outcome : Jumlah nelayan yang meningkat pemahamannya tentang keamanan, kesehatan, dan keselamatan di era "new normal"	orang	40	40	100,00	

Mangupura, 4 Februari 2021
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung,



I Nyoman Suardana, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19721010 199302 1 002